

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian memiliki peran krusial dalam ekonomi nasional, sehingga sektor pertanian selalu menjadi salah satu target pembangunan utama dalam rangkaian rencana pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh peran penting pertanian sebagai kebutuhan utama masyarakat, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, sektor pertanian secara luas juga menjadi sumber penghasilan utama, penyerap tenaga kerja, pengentas kemiskinan, serta penyangga kestabilan ekonomi nasional (Insyafiah dan Wardani, 2014). Peran vital sektor pertanian menjadi salah satu tujuan utama dari konsep pembangunan berkelanjutan dunia oleh PBB, yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu-isu kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan melalui food securities menjadi tujuan utama karena terletak pada SDGs 1 dan SDGs 2. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi sektor utama dalam mendukung keberlanjutan tersebut.

Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Luasnya definisi sektor pertanian termasuk pangan di dalamnya menunjukkan bahwa jika dikelola dengan optimal, sektor pertanian dapat menjadi penopang kuat pada perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari BPS (2018) bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2015-2017.

Sesuai dengan pengertian pangan pada UU tentang Pangan, salah satu subsektor unggulan adalah peternakan. Usaha peternakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hingga nasional, sebab sektor peternakan menciptakan pangan dengan kualitas dan manfaat yang sangat tinggi seperti daging, susu dan telur. BPS (2020) mencatat bahwa pada tahun 2019, subsektor peternakan mengalami peningkatan sumbangan terhadap PDB Indonesia sebesar 7,78 persen, dan menjadi yang paling tinggi di antara subsektor

lainnya mencakup pangan, hortikultura, dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan dapat menjadi andalan dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pembangunan peternakan adalah dengan mengoptimalkan peran subsektor peternakan berbasis agribisnis kerakyatan. Dalam berbagai program unggulannya, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan produktivitas ternak dengan cara memperkuat sistem pemeliharaan dan manajemen peternakan, antara lain dengan peningkatan kualitas pakan, bibit, kesehatan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif, pasca panen, pengolahan produk asal hewan, serta manajemen usaha (Kementerian Pertanian, 2018). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan skala ekonomi dan kelembagaan peternak. Hal tersebut dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pembiayaan subsektor peternakan, di antaranya mulai tahun 2017 pemerintah meningkatkan anggaran alokasi APBN terutama untuk program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Iindukan Wajib Bunting), mendorong peternak untuk tergabung ke dalam kelompok sehingga pola pemeliharaan ternak menjadi pola perkandangan koloni, mengajak dan mendampingi peternak untuk berkorporasi pada aktivitas pengembangan kawasan peternakan dan pendampingan petugas, penyediaan skim kredit melalui program KUR, dan mengembangkan bentuk pembiayaan usaha di bidang peternakan berbasis kemitraan.

Sektor usaha peternakan diketahui memiliki risiko lebih tinggi terutama jika terjadi kematian ternak itu sendiri (Ullah et al., 2016; Wahyuningsih dan Hasan, 2019). Peternak dihadapkan pada kondisi yang tidak dapat diperkirakan sehingga pendapatan menjadi tidak tetap. Risiko yang dihadapi peternak antara lain harga input produk yang fluktuatif, perkembangan teknologi, perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar yang tidak menentu. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 01 Tahun 2020 menambahkan bahwa risiko peternakan adalah kematian ternak yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kecelakaan, bencana alam, termasuk wabah penyakit. Aktivitas pergudangan, pengangkutan dan harga pasar yang rendah juga memicu kerugian peternak. Keseluruhan masalah tersebut mendatangkan masalah keuangan, terutama pada peternak

berskala kecil. Ikutan persoalan adalah hilangnya penghasilan keluarga, konsumsi menurun, dan kehilangan aset yang membawa kepada kemiskinan dan kelaparan.

Risiko tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan keberadaannya, akan tetapi dapat diminimalisir (Hasan et al., 2017; Meyer, 2014). Asuransi menjadi satu solusi pengelolaan risiko demi keberlanjutan usaha bagi peternakan, baik usaha berskala besar maupun peternakan yang dikelola oleh peternak kecil. Pada level usaha internasional berskala besar, Noll dan Johr (2010) menyebutkan bahwa Nestle memfasilitasi asuransi bagi peternak sapi perah. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kepastian mutu terkait integrasi ke belakang (backward integration) melalui pengendalian kualitas dan keamanan pangan. Bentuk aktivitasnya adalah melalui paket asuransi usaha, seleksi pemasok dan sistem pasokan yang dapat ditelusuri serta pendidikan para pemasok itu sendiri. Sebagai tambahan, skim asuransi menjadi salah satu bagian penting dalam pengendalian lingkungan, konservasi air dan lahan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca bagi perusahaan itu sendiri.

Pemerintah memiliki peran besar dalam hal pengelolaan risiko melalui program asuransi, sehingga dapat menanggulangi kemungkinan dampak buruk yang besar bagi banyak peternak, khususnya peternak skala kecil (OECD, 2016). Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagai upaya peningkatan skala ekonomi peternak, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian juga meluncurkan program Asuransi Pertanian yang kemudian diturunkan menjadi Asuransi Peternakan melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi. Program asuransi ini merupakan program untuk mengalihkan risiko dengan cara pemberian ganti rugi yang dialami oleh peternak sehingga usaha peternak tetap akan bertahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program asuransi peternakan menjadi metode penanggulangan risiko yang sangat penting bagi peternak (Sulewski, 2014).

Mulanya, program AUTS merupakan salah satu program bantuan asuransi pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah mulai tahun 2016 khususnya untuk sapi UPSUS SIWAB yang termasuk ke dalam kelompok peternak. Program ini

didiseminasikan oleh Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping (SMD WP) sebagai bagian dari program pemerintah untuk penguatan ekonomi dan kelembagaan peternak. Disebabkan oleh banyaknya peminat program asuransi hingga peternak di luar kelompok, program ini menjadi terus berkembang dengan menggandeng berbagai lembaga mitra. Melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2019, Kementerian Pertanian mencurahkan program tersebut menjadi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dengan membantu dalam membayar premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan (Kementan, 2020). Program AUTS/K merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, sebab karakteristik usaha ternak sapi/kerbau memiliki risiko yang tinggi, terutama subsektor budidaya dan pembibitan sapi/kerbau yang sangat mudah terkena atau terinfeksi penyakit dan kematian yang pada akhirnya mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi peternak.

Tujuan penyelenggaraan AUTS/K oleh pemerintah adalah agar dapat melindungi usaha para peternak apabila terjadi berbagai risiko seperti kematian dan/atau kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi peternak melalui skema pertanggungjawaban asuransi. Selain itu, melalui program ini pemerintah juga dapat memberikan edukasi bagi peternak dalam hal pengelolaan risiko dan usaha peternakan yang baik. Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah agar dapat melindungi usaha peternakan yang dikelola oleh peternak sehingga apabila terjadi risiko yang menyebabkan kerugian, mereka masih dapat melanjutkan usahanya (Kementan, 2020). Realisasi AUTS/K yang fokus pada asuransi sapi/kerbau bagi peternak berskala kecil telah menjangkau 26 provinsi di Indonesia (An-nisa et al., 2018; dan Sulaiman et al., 2018).

Sebelum AUTS diterapkan secara nasional, pada tahun 2012-2014 dilakukan *pilot project* untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat peternak untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Uji coba AUTS dilaksanakan di enam provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sumatera Barat (Sulaiman et al., 2018). Sumatera Barat menjadi salah satu dari tiga provinsi pertama yang menjalankan pilot project AUTS pada tahun 2013, yaitu di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 ekor

sapi. Hingga saat ini, Sumatera Barat terus menjadi salah satu provinsi yang aktif menjalankan program AUTS/K. Berdasarkan data laporan OJK tahun 2019 tentang Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil, dan Asuransi Nelayan, jumlah ternak sapi yang diasuransikan oleh peternak pada tahun 2017 sebanyak 1.984 ekor, tahun 2018 sebanyak 7.080 ekor, dan pada tahun 2019 per Juni 2019 sebanyak 3.849 ekor sapi (OJK, 2020).

Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbesar setelah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Sijunjung dalam penggunaan AUTS/K, yaitu sebanyak 79 polis dengan sapi yang diasuransikan sejumlah 411 ekor. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan (2020), terdapat penambahan polis pada tahun 2018 sebanyak 135 polis, dan semakin meningkat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 538 polis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tren peningkatan peserta AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017-2019 sebesar 582,01%. Sementara itu, pada tahun 2018 terdapat 330 ekor ternak yang diasuransikan, dan mengalami peningkatan hingga 1.275 ekor tahun 2019, sehingga tren peningkatan sapi yang diasuransikan adalah sebesar 210,2%. Besarnya tren peningkatan peternak yang menggunakan AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk keberlanjutan usaha ternak sapi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Adopsi merupakan proses menerima dan menerapkan inovasi dan atau perubahan perilaku pada diri seseorang baik perubahan pada aspek pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), dan keterampilan (*psychomotoric*) atas inovasi yang diterimanya, yang disampaikan oleh fasilitatornya. Proses adopsi merupakan proses yang dilaksanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang dibawa oleh agen perubahan kepada masyarakat penerima manfaat (Mardikanto, 2009). Salah satu yang mempengaruhi proses adopsi seseorang dalam perubahan perilakunya adalah persepsi mereka terhadap inovasi tersebut. Hal ini disebabkan karena persepsi dapat menyebabkan setiap individu mengartikan objek serupa dengan beragam cara, tergantung ransangan fisik,

lingkungan sekitar, karakteristik individu, dan pengalaman masa lalu mereka (Liliweri (2011; Rakhmat, 2012; Kotler dan Keller, 2016). Hal ini dapat menyebabkan suatu hal yang sama dapat bernilai positif atau negatif. Seseorang yang memiliki kesan positif terhadap suatu objek, informasi, program dan sebagainya, maka hal tersebut akan menghasilkan persepsi positif. Demikian juga sebaliknya dalam memaknai persepsi negatif.

Persepsi seseorang terhadap program yang berbentuk inovasi tertentu merupakan landasan atau dasar utama bagi proses adopsi (Chanafi et al., 2015). Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya dalam keputusan adopsi (Rakhmat, 2012). Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu (Moko et al., 2017; Panggabean et al., 2016; Wahyuningsih dan Hasan, 2019) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh persepsi petani terhadap proses adopsi individu terhadap suatu inovasi berbentuk program atau kegiatan baru dalam aktivitas pertanian.

Rogers (2003) menyebutkan bahwa proses adopsi disebabkan karena berbagai faktor, antara lain adalah sifat atau karakteristik inovasi, sifat atau karakteristik calon pengguna, pengambilan keputusan adopsi, saluran atau media yang digunakan, dan kualifikasi fasilitator. Sejalan dengan hal tersebut, keberhasilan adopsi program AUTS/K sebagai salah satu bentuk inovasi berbentuk program pemerintah untuk peningkatan ekonomi dan kelembagaan peternak, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecepatan adopsi inovasi program atau teknologi baru dipengaruhi oleh hal tersebut, seperti hasil penelitian Saridewi dan Siregar (2010), Fachrista dan Sarwendah (2014), dan Yanti (2019) yang menyebutkan bahwa tingkat adopsi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi, karakteristik individu, dan pengambilan keputusan adopsi.

Proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan juga tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung kecepatan adopsi tersebut. Karakteristik individu, persepsi peternak terhadap manfaat program AUTS/K, dan karakteristik inovasi dapat mendorong pengambilan keputusan peternak terhadap penerimaan atau penolakan program AUTS/K untuk usaha ternak mereka. Nurlaili

dan Rochijan (2019) menyebutkan bahwa adopsi inovasi teknologi peternakan merupakan upaya peningkatan produktivitas bisnis, sebab melalui proses adopsi inovasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta peningkatan pendapatan peternak. Ia menjelaskan bahwa tingkat adopsi peternak terlihat dari keberlanjutan penggunaan program oleh peternak. Sejalan dengan hal tersebut, diduga bahwa proses adopsi peternak terhadap program AUTS/K dan persepsinya terhadap program tersebut juga turut menjadi penentu keberlanjutan adopsi program tersebut oleh peternak di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik peternak dan ternak peserta AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana persepsi peternak terhadap program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Bagaimana keberlanjutan program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Karakteristik peternak dan ternak peserta AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Persepsi peternak terhadap program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Keberlanjutan program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan bagi pemerintah agar dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Indonesia umumnya dan di Provinsi Sumatera Barat khususnya.
- b) Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepuasan peternak dalam program AUTS/K di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini dapat:

- a) Memberikan informasi mengenai asuransi di bidang peternakan khususnya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Sumatera Barat.
- b) Menjadi dasar bagi penelitian berikutnya guna menyempurnakan penelitian mengenai Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Sumatera Barat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas data mengenai karakteristik peternak dan ternak yang mengikuti program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan, persepsi peternak terhadap program AUTS/K, proses adopsi program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan, serta keberlanjutan program AUTS/K di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan melibatkan peternak yang mengikuti program AUTS/K pada beberapa kecamatan terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri lima bab sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan: pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

- Bab II Tinjauan Pustaka : pada bab ini dikemukakan landasan teoritis dan penelitian ini, terminologi dan asumsi-asumsi serta kajian-kajian para pakar yang menunjang topik penelitian ini.
- Bab III Metode Penelitian: pada bab ini diterangkan sumber data, asumsi-asumsi yang dibuat dalam penelitian, cara pengolahan data yang didapat dan hasil yang diharapkan.
- Bab IV Hasil dan Pembahasan: pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang telah ditinjau pada bab sebelumnya. Dikembangkan solusi untuk masalah yang diajukan. Dibuat komparasi hasil solusi yang diajukan dengan kondisi yang ada.
- Bab V Penutup: pada bab ini disajikan kesimpulan penelitian serta saran-saran berpedoman kepada hasil penelitian.

